

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.W. Widjaja. 2009. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Cetakan Pertama. RajaGrafindo, Jakarta.
- Abdul Latif. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pertama. UUI Press, Yogyakarta.
- Atep Adya Brata. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Cetakan I. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta, Sinar Grafika.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Pertama. Alfabeta, Bandung.
- Inu Kencana Syafii dan Welasari. 2017. *Ilmu Administrasi*. Cetakan Kedua. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Cetakan Keenam. Nuansa Cendekia, Bandung.
- Nomensen Sinamo. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Pertama. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Nur Basuki Minarno. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan Kedua. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Ketiga. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat. Liberty, Yogyakarta.

Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan & Jabatan*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.

W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi IV. Gramedia, Jakarta.

## **C. Internet**

<http://id.shvoong.com>.

<http://www.pengertianku.net>.

<https://www.statistikian.com>.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674).

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5475).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601).

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas Sekertariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian Uptd Serta Tata Cara Kerja Bagian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.